



Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

LAPORAN KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

2023



Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. Dalam dokumen ini dimuat berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam bentuk pengukuran capaian kinerja output, kinerja program, dan kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan, program, dan sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2023.

Bandar Lampung, Februari 2024

KEPALA DINAS,

Dra. EVIE FATMAWATY, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690210 199001 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis pada Renstra (Revisi) tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan; 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting.

Hasil capaian kinerja menunjukkan keempat (4) sasaran strategis capaiannya sangat tinggi yaitu : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 23,33% 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan 143,5%; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri 127,4%; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting 82,66%. Dari hasil pengukuran kinerja baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2023 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, walaupun untuk pencapaian kinerja pertumbuhan sector industry tergolong sangat rendah. Hal tersebut terkait dalam pelaksanaan masih banyak dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah berupaya secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Peindustrian dan Perdagangan....	2
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Isu Strategis	7
1.5. Landasan Hukum	8
1.6. Inovasi Perangkat Daerah	9
1.6. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis 2019-2024	13
a. Visi dan Misi.....	15
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator	15
c. Indikator Kinerja Utama.....	19
d. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2. Indikatro Kinerja Utama.....	26
3.3. Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	29
3.4. Akuntabilitas Keuangan Pagu & Realisasi Anggaran.....	80
3.5. Prestasi yg dicapai Disperindag Provinsi.....	86
3.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi.....	86
BABIV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	94

LAMPIRAN

1. Matrik CCD Perubahan Renstra 2019-2024.
2. Perubahan SK IKU.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	3
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	17
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung	18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	19
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023	21
Tabel 2.6 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 (APBD-P)	21
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2 Analisis Capaian Sasaran.....	28
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi	31
Tabel 3.4 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.....	33
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB.....	52
Tabel 3.6 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan.....	53
Tabel 3.7 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Perdagangan Luar Negeri.....	67

Tabel 3.8	Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	69
Tabel 3.9	Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2022-2023	69
Tabel 3.10	Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2022- 2023	70
Tabel 3.11	Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional	71
Tabel 3.12	Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting.....	76
Tabel 3.13	Refocusing Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	80
Tabel 3.14	Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran 2023	82
Tabel 3.15	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	86

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Rekapitulasi Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang.....	2
Gambar 1.2 Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	2
Gambar 1.3 Data Pegawai Non PNS Berdasarkan Pendidikan	3

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	29
Grafik 3.2	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	50
Grafik 3.3	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas.....	64
Grafik 3.4	Andil Inflasi Bahan Makanan.....	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan pada dasarnya dituntut agar berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan serta akuntabel maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

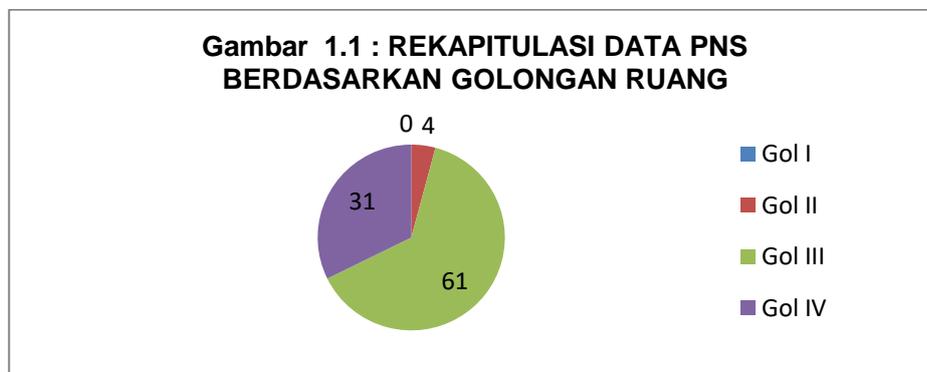
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan



akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

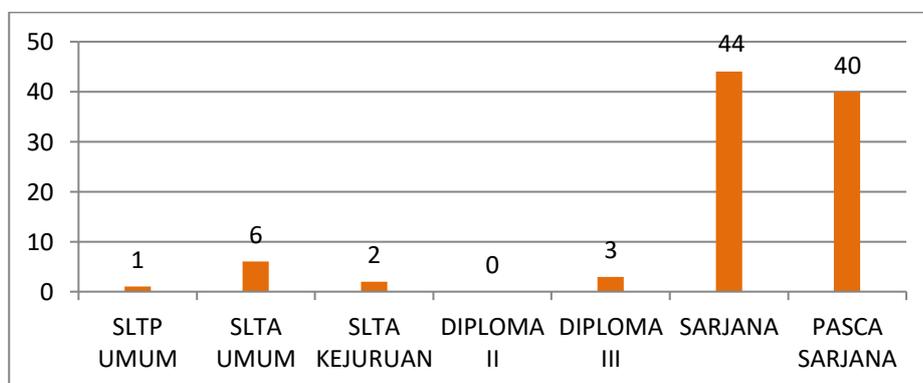
Sampai dengan Desember tahun 2023, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki 126 orang pegawai yang terdiri dari 96 Pegawai Negeri Sipil dan 29 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan sebagai berikut :



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada DINAS Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV. Jumlah PNS dengan golongan III adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 61 orang, kemudian PNS dengan golongan ruang IV sebanyak 31 orang, sedangkan yang terendah golongan ruang II dengan jumlah sebanyak 4 orang.

Gambar 1.2 : Data PNS berdasarkan pendidikan

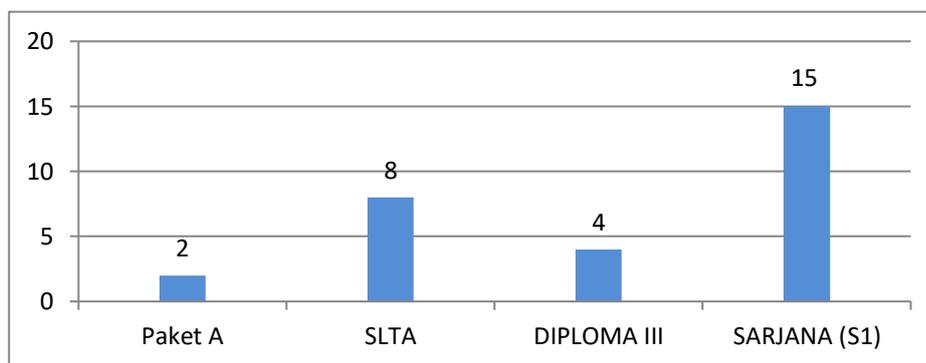


Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung



Berdasarkan gambar 1.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 40 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 44 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 : Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan Paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 4 orang dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 15 orang.

Dalam pengelolaan asset sampai dengan Desember 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah asset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 1.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	10	1.879.004.000
2	Peralatan dan Mesin	1.216	138.389.707
3	Gedung dan Bangunan	42	10.381.224.718
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	668.685.928
5	Aset Tetap Lainnya	1	201.552.000
TOTAL		3.833	26.135.440.086

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung

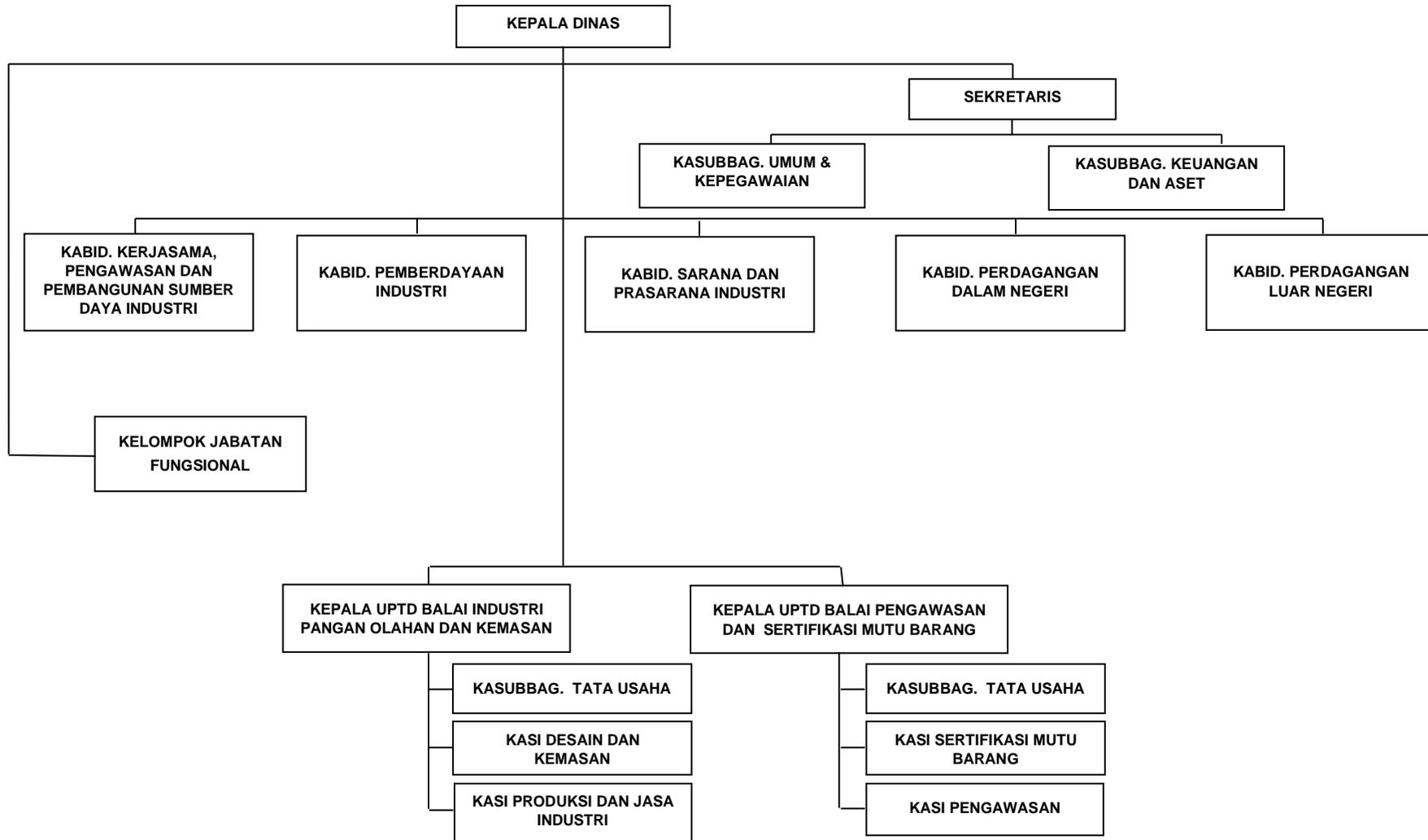


Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki asset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jala, irigasi dan jaringan; dan asset tetap lainnya. Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung, Pringsewu dan Lampung Selatan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung





1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan , pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama , pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrologian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitas tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan Penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provisni Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



1.4 Isu Strategis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi permasalahan yang sangat kompleks sebagaimana isu-isu strategis berikut:

Sektor Industri

- Pemulihan dampak pandemi dengan membangkitkan kembali IKM, melalui fasilitasi, pelatihan, pembinaan, dan bantuan kepada IKM;
- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian (secara luas) untuk peningkatan nilai tambah;
- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal penerapan standar mutu/kualitas (PIRT, BPOM, HALAL), penggunaan teknologi dan inovasi, diversifikasi produk, serta pengemasan;
- Belum optimalnya potensi kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
- Promosi produk IKM belum optimal, baik secara digital maupun non digital (Kerjasama dengan BUMD dan Dekaranasda);
- Penetapan 4 (empat) Kawasan Industri Prioritas Nasional di Provinsi Lampung pada RPJMN 2020—2024;
- Promosi peluang investasi bidang industri dan investasi pada Kawasan Industri.

Sektor Perdagangan

- Pemulihan dampak pandemi dengan meningkatkan akses pasar bagi IKM/PKM, baik promosi produk secara digital (*e-commerce*/media sosial) maupun berupa event/bazar/galeri UMKM, serta bantuan pendaftaran merk dagang.
- Fluktuasi harga komoditi pertanian, terutama bahan pangan pokok masih tinggi, terutama menurunnya harga pada saat panen raya.
- Pengembangan dan diversifikasi produk ekspor potensial belum optimal;
- Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan antar daerah, serta akses pasar dalam dan luar negeri untuk produk unggulan daerah;
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok dan barang penting;
- Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, melalui mekanisme pengaduan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.



1.5 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Provinsi (LKIP) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
16. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 060/0057/07/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permintaan Data Capaian IKU Provinsi Lampung.

1.6 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi/terobosan menjadi kunci dalam reformasi birokrasi, pembangunan daerah serta perbaikan kinerja pelayanan publik. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi pemerintah, masyarakat dan lingkungan dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan berorientasi yang bersifat menyeluruh, untuk kepentingan masyarakat serta berpegang pada azas prioritas.

Adapun Inovasi Pemerintah Provinsi Lampung pada urusan Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah :



Gallery SiKam

Sistem Informasi IKM Lampung dan Produk IKM (<https://gallery-ikm.disperindag.lampungprov.go.id/>) dapat di download pada play store atau google store.



Manfaat

1. Manfaat pemasaran digital bagi para konsumen atau pembeli yaitu dapat melihat informasi mengenai detail informasi produk IKM Lampung yang ditawarkan melalui website atau aplikasi, sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan pencarian produk unggulan Lampung yang dibutuhkan dan diinginkannya.
2. Etalase digital produk IKM Lampung dan sarana Promosi, penjualan online Produk UKM/IKM Provinsi Lampung.
3. Memudahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan kepada UKM/IKM, memperoleh data UKM/IKM yang Valid baik nama, alamat serta jenis produknya serta kapasitas produksi serta pemasaran.

Dampak

Bagi IKM memberi dampak perluasan pasar dan promosi sehingga produk lebih dikenal masyarakat, meningkatkan omset dan peningkatan kapasitas produksi produk IKM Lampung.

SIGAP LAMPUNG

(Sistem Informasi Harga Pasar Provinsi Lampung)

<https://disperindag.lampungprov.go.id/pasar/semua>
aplikasi SIGAP LAMPUNG dapat di download pada play store atau google store.



Aplikasi Sigap merupakan aplikasi yang berguna untuk masyarakat, stakeholder dan pengambil kebijakan agar dapat mengetahui perubahan harga komoditas pasar di Provinsi Lampung secara harian. Aplikasi ini juga di dukung dengan fitur sistem laporan dan analisa data agar memudahkan pengguna aplikasi.

Pada Tahun 2023 merupakan proses pengembangan Inovasi dengan penambahan Fitur Stok bahan pokok pada beberapa pasar di Provinsi Lampung.

Dampak

1. Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat apabila terdapat lonjakan harga diatas rata rata sehingga inflasi dapat terkendali.
2. Pemerintah dapat memantau ketersediaan stock bahan pokok dan bahan penting secara berkala, sehingga dapat mengambil kebijakan apabila terjadi kelangkaan atau over stock.
3. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga bahan pokok riil time setiap hari kerja.



e-Pasar Lelang merupakan Pasar Fisik terorganisasi bagi Pembeli dan Penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. Aplikasi ini baru dibangun di tahun 2023, masih pada tahap percobaan.

Manfaat Pasar Lelang Komoditas:

- Mempertemukan kepentingan produsen dengan pemilik komoditi
- Efisiensi mata rantai perdagangan
- Pembentukan harga yang transparan
- Referensi harga

Dampak

Mempertemukan kepentingan produsen, UKM dengan pemakai langsung, pabrik, pedagang besar, merupakan Efisiensi mata rantai perdagangan, menjadi pembentukan harga yang transparan, Referensi harga dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah.

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2022 adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perubahan Perjanjian Kerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan Rencana Strategis serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2019 - 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah



disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi terhadap RPJMD Provinsi Lampung, begitu juga dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi yang baik antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari



semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

a. Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisidan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- 1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
- 2. Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
- 3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
- 4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
- 5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
- 6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **Misi Lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan



membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi daerah (%).

Ke- 4 (empat) sasaran berdasarkan Renstra Revisi tahun 2021, merupakan hasil asistensi dengan pihak-pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu-isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut ;



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2020	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju Inflasi (%)	4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2020	2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	-	5	5,8	6	6,3
			2 Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-	5,3	6,3	6,8	7,2
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	3,3	3,48	3,65	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2



c. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Nilai ekspor non migas selama 1 tahun	BPS Provinsi Lampung	Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	%/tahun	Menjaga agar harga bahan pokok stabil	Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun
2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Nilai ekspor non migas selama 1 tahun	BPS Provinsi Lampung	Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	%/tahun	Menjaga agar harga bahan pokok stabil	Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting



d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	6
2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	6,8
3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,65
4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan Makanan	%	≤ 1,5

Tabel 2.6
Pagu Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.257.566.549	19.426.884.589
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	70.000.000	58.750.000
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	380.000.000	3.762.000.000
4.	Program Pengembangan Ekspor	1.200.000.000	1.250.000.000
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.213.000.000	1.361.947.000
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	800.000.000	766.750.000
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.392.412.530	8.894.448.307
8.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000	175.000.000
9.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80.000.000	80.000.000
TOTAL		31.567.979.079	35.775.779.896



Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan jani dari perencana kinerja sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan unruk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Matrik Program Perioritas

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung Persentase IKM Unggulan yang memahami prinsip-prinsip industri hijau Persentase SMK yang sudah melakukan kerjasama dengan indsutri Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki Standarrisasi Industri Persentase realisasi Penyerapan PAD Persentase peningkatan nilai investasi di sektor industri	1 % 5% 10% 20% 100% 15%



No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<p>Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait</p> <p>Persentase realisasi Industri Kecil (IKM) di Provinsi Lampung yang masuk dalam SIINAS</p>	<p>15%</p> <p>25%</p>
2.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	<p>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>Persentase cakupan barang beredar yang diawasi</p> <p>Persentase Peningkatan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang</p> <p>Persentase IKM/PKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran</p> <p>Pertumbuhan Implementasi pasar lelang komoditas (PLK)</p> <p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p>	<p>17,5%</p> <p>1%</p> <p>5%</p> <p>70%</p> <p>BB</p>
3.	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<p>Persentase Industri Kecil Menengah yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang dilatih Bimtek Ekpor per tahun</p>	10%
4.	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<p>Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu</p>	5-6 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata



cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2022

No	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang di tuangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 015/KP/V.26/Sekret.1/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator



Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023

Berdasarkan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2021-2024.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan Misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung yang tertera pada RPJMD akan difokuskan pada : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung” dengan Sasaran Pembangunan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).

3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah andil inflasi bahan makanan (%).

Ke- 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan di pandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Lampung tahun 2023, kami sajikan pada tabel dimana terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada 2 indikator kinerja utama urusan perdagangan, sedangkan indikator andil inflasi bahan makanan bernilai **tinggi** dan indikator pertumbuhan sektor Industri **sangat rendah**.



Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN														NASIONAL
			2019	2020			2021			2022			2023			2024		2023
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	8.24	-	-	-	5	4.57	91.4	5.8	0.47	8.1	6	1.4	23.33	6.3	22.222	4,64
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	8.26	-	-	-	5.3	8.26	100	6.3	15.35	243.7	6.8	9.76	143.5	7.2	135.56	4,85
3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	2.13	-	-	-	3.33	4.83	100	3.48	5.61	161.2	3.65	4.65	127.4	3.8	122.37	258,82
4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0.3	-	-	-	≤ 1,5	1.1	100	≤ 1,5	0.91	100	≤ 1,5	2,74	82,66	≤ 2	37	1,60

3.2 Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

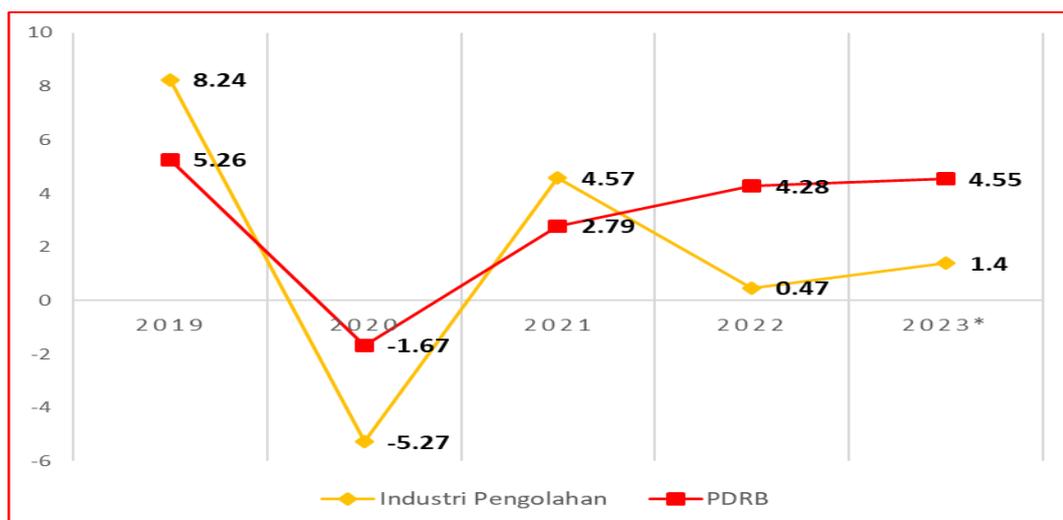
Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung secara rinci adalah sebagai berikut:

A. SASARAN 1

SASARAN 1														
Sasaran 1		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan												
IKU		: Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)												
Satuan		: Persentase												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	8.26	-	-	-5.25	-	5	4.57	91.4	5.8	0.47	8.1	6	1.4	23.33

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan” adalah sebesar 1,4% dari target sebesar 6% yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 23,33%, capaian ini masih jauh dengan target yang diperjanjikan. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan masuk dalam kriteria penilaian realisasi **kinerja sangat rendah**.

Grafik 3.1
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB



Sumber Data : diolah dari Data BPS

Meskipun nilai pertumbuhan sektor Industri pengolahan hanya sebesar 1,4% namun distribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB tetap konstan sebesar 4,55%.



Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2023 tumbuh positif sebesar 1,4%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu (y on y). Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung dengan membaiknya permintaan produk industri dari luar negeri dan juga mulainya musim panen tebu pada industri gula di Provinsi Lampung. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tertinggi pada kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 8,24%; Pertumbuhan sektor industri pengolahan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -5,27%.

SASARAN 1			
Sasaran 1		:	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
IKU		:	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)
Satuan		:	Persentase
Provinsi 2024		Nasional 2023	
Target	Capaian	Realisasi	
6.3	22.22	4,64	

Tahun 2023 adalah tahun keempat Renstra, dimana dibanding tahun sebelumnya kinerja pertumbuhan sektor industri pengolah mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2023 dibanding dengan target kinerja akhir Renstra di tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 22,22% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 6,3%. Capaian tersebut merupakan persentase capaian kinerjanya kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah.

Capaian kinerja Pertumbuhan sector industri pengolahan Provinsi Lampung sebesar 1,4% apabila dibandingkan dengan data nasional yaitu realisasi 2023 sebesar 4,64% maka Pertumbuhan Sektor Industri Lampung berada jauh dibawah capaian nasional, ini berarti Provinsi Lampung terpengaruh dengan perkembangan ekonomi dunia yang mengalami ketidakpastian global pada masa pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan sektor industri namun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Indikator Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan adalah Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) industri pengolahan. Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan. Perhitungannya pertumbuhan sektor industri pengolahan diperoleh dari :

$$\frac{\text{PDB Industri Pengolahan } t - \text{PDB Industri Pengolahan } t-1}{\text{PDB Industri pengolahan } t-1} \times 100\%$$

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai terakhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Lampung ada 408 perusahaan, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 385 perusahaan. Industri makanan (KBLI 10) merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak di Provinsi Lampung. Potensi sektor pertanian yang menghasilkan komoditas tebu, kelapa sawit, ubi kayu dan beberapa komoditas strategis lainnya membuat industri makanan memiliki andil yang besar terhadap perekonomian Lampung. Terdapat 264 perusahaan (64,71 persen) perusahaan yang bergerak di industri makanan, sisanya merupakan industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kayu dan barang dari kayu, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang galian bukan logam, industri minuman, dan lain-lain. Pertumbuhan Ekonomi Lampung menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw III-2023 Terhadap Triw III-2022 (y-to-y)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4,34	-18,69	1,28	-0,40	0,55	0,15
B. Pertambangan dan Penggalian	7,69	3,08	6,94	8,28	2,89	0,14
C. Industri Pengolahan	4,48	-5,94	0,49	2,94	1,40	0,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	-9,25	3,03	-7,74	1,13	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	-1,89	0,83	-0,70	0,51	0,00
F. Konstruksi	7,71	8,16	9,49	15,16	7,06	0,72
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,09	2,04	7,15	8,16	9,76	1,34
H. Transportasi dan Pergudangan	1,16	6,17	13,07	11,03	16,66	0,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	0,67	11,84	9,78	13,38	0,20
J. Informasi dan Komunikasi	-0,79	2,12	4,57	6,31	7,50	0,40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,02	-1,72	5,47	13,26	3,19	0,06
L. Real Estat	2,66	3,46	1,07	0,92	0,86	0,03
M,N. Jasa Perusahaan	4,78	2,89	5,26	4,06	5,79	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,98	6,81	-8,29	-2,33	0,12	0,00
P. Jasa Pendidikan	1,01	-0,27	0,82	3,47	2,23	0,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,55	3,52	3,42	8,55	3,87	0,04
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,52	1,24	13,22	11,80	15,38	0,16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,74	-3,99	3,93	5,40	4,55	4,55



Secara pertumbuhan, industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 1,40%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 lalu yang hanya sebesar 0,47%. Adapun Adapun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,66%, Penyediaan Akomodasi dan Makan minum sebesar 13,38%, serta perdagangan besar dan eceran sebesar 9,76%.

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang melemah, kondisi industri pengolahan tetap tumbuh dan berhasil lepas dari krisis yang terjadi pada 2023, itu sebagai kerja keras dan resiliensi sektor industri Lampung. Sepanjang 2023, perekonomian dunia dibayangi oleh perdagangan global yang mengalami kontraksi, akibat penurunan nilai perdagangan barang. Namun, industri pengolahan masih tumbuh stabil, didukung oleh permintaan domestik dan global.

Terdapat beberapa permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat serta Solusi dalam meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi
dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

No.	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1	Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian (secara luas) untuk peningkatan nilai tambah;	<ol style="list-style-type: none">1. Sektor Industri di Provinsi Lampung itu sangat di pengaruhi oleh Industri Pertanian seperti Gula (7 pabrik), Nenas (GGPC), CPO, Pakan ternak (jagung) dan Udang.2. Meningkatkan produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Lampung.3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terus mendorong kegiatan produksi, sehingga terus berkembang ke luar negeri dan mendapat keuntungan lebih.	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;2. Tidak tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku <i>penyedia</i> dengan dunia industri selaku <i>user</i>;	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;2. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



		<p>4. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan.</p>	<p>3. Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;</p> <p>4. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;</p>		
--	--	---	---	--	--



Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan

- Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatkan persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian Provinsi Lampung. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor terbesar kedua dalam PDRB Provinsi Lampung secara nasional industri pengolahan merupakan sektor terbesar dalam PDB nasional.
- Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada akhir tahun 2023 masih dengan dasar perhitungan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dengan target 6% dan realisasi sasaran strategis ini adalah 1,40%. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator kinerja masih sangat jauh dari target yang ditentukan karena beberapa komoditas mengalami penurunan harga.
- Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini di dukung oleh kegiatan berikut :

1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 8.894.448.307- dengan realisasi anggaran senilai Rp.588.599.772,- (98,10%). Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Pelaksanaan Sub kegiatan ini melalui :
 - Bimbingan Teknis Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Pekon Way Sindi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s/d 2 Agustus 2023.



- Bimbingan Teknis Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Pekon Lugu Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 26 Juli 2023.



- Bimbingan Teknis Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Pekon Sumber Mulyo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus □ 10 Juli s/d 12 Juli 2023



- Bimtek Evaluasi Kawasan Industri Prioritas PSN dan RPJMN 2020-2024 di Provinsi Lampung, pada tanggal 24 Agustus 2023 di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung.



- b. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.1.316.748.307,- dengan jumlah target indikator 2 dokumen. Realisasi anggaran senilai Rp. 1.313.276.641,- (99,74%). Pelaksanaan Sub kegiatan ini melalui :

- Melaksanakan rapat pembentukan komunitas, monitoring dan pembinaan ke enam (6) Kabupaten di Provinsi Lampung guna membangun potensi peluang kemitraan.



- Melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama antara sembilan (9) SMK dengan lima (5) Perusahaan di Provinsi Lampung yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama.



- Melaksanakan Audiensi terkait studi kasus perusahaan/industri yang telah memanfaatkan fasilitas *SuperTax Deduction* (STD), pada tanggal 30 agustus s.d. 1 september 2023 di BPSDMI kemenperin RI Jakarta.



- Melaksanakan Kurasi Produk IKM 2023, pada tanggal 9 s.d. 10 agustus 2023 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



- Melaksanakan Business Matching dengan mempertemukan Kelompok Tani Lada dengan para Buyers baik nasional maupun internasional. Pada tanggal 30 september 2023 di Hotel Whiz Prime Lampung.



- Melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh pelaku industri pada PT Mitra Pati Mas Pekalongan Lampung Timur.



- Melakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah.



- Melaksanakan Festival Rempah dan Lada Lampung pada tanggal 2-4 Oktober 2023 di Halaman Parkir Transmart Lampung.



- Melaksanakan Rapat FGD pada tanggal 10 oktober 2023 di Hotel Horisan Bandar Lampung.



- Melakukan Bimtek Pemahaman Aturan Cukai Hasil Tembakau dan Standar Kualitas Bahan Baku pada tanggal 16 November 2023 di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung.



- Melaksanakan Business Matching P3DN pada tanggal 29-30 November 2023 di Hotel Radisson Lampung dan MBK.



- c. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.1.350.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Realisasi anggaran subkegiatan ini senilai Rp.1.325.226.096,- (98,16%). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam subkegiatan ini diantaranya :

- FGD Penguatan Penggunaan Produk Lokal (P3L) di Hotel Emersia Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 2023 yang di hadiri oleh 100 peserta.



- Business Matching P3DN di Hotel Emesia Bandar Lampung pada tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri oleh 116 peserta.



- d. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 5.577.700.000,- dengan jumlah target indikator 2 dokumen. Realisasi anggaran subkegiatan ini senilai Rp.5.528.506.935,- (99,12%). Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Industri

- Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi IKM Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2023 di Aula Kantor Korpri dengan peserta 40 IKM.



- Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi IKM Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2023 di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan peserta 40 IKM.



- ✓ Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi IKM Kabupaten Way Kanan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2023 di Gedung Aula Anggota Dewan dengan peserta 40 IKM.



- ✓ Bimtek Pembuatan Mesin Produksi Bagi Wira Usaha Baru di diselenggarakan pada tanggal 24-26 Mei 2023 di Hotel Alivia Bandar Lampung.



- ✓ Verifikasi Wawancara Calon Penerima Hibah Alat/ Mesin Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Pelaku IKM, pada tanggal 22 juni 2023 di Hotel Whizz Prime.



- ✓ Verifikasi Lapangan Calon Penerima Hibah Alat/ Mesin Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Pelaku IKM, pada tanggal 17 s.d. 21 Juli 2023 di Bandar Lampung, Lampung Selatan, tanggamus dan Pringsewu.



- ✓ Penerapan Industri Hijau/ Industri Bersih pada IKM di Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Surabaya.



- ✓ Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri Rokok, pada tanggal 22-26 Mei 2023 di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah yang di ikuti oleh perwakilan dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.
- ✓ Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Industri Rokok/Tembakau, pada tanggal 21 – 26 November 2023 di Hotel Skyland Sumedang Jawa Barat. Dengan mengikut sertakan 12 Pelaku Usaha.
- ✓ Pemberian Hibah Bantuan alat/mesin produksi bagi kelompok masyarakat IKM di Provinsi Lampung sebanyak 791 unit dengan penerima manfaat 94 kelompok usaha yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada bulan agustus dan september 2023 dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas/mutu produk IKM agar memperkuat daya saing di pasar domestik dan pasar luar negeri.

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Desain Kemasan dan Digital Marketing, pada tanggal 14 s.d. 15 September 2023 di Hotel Horison Bandar Lampung.



- Studi Kooperatif ke UPTD Rumah Kemasan dan Promosi Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 27-30 November 2023.



- Perbaikan Mesin Vertical Packaging Rumah Kemasan UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tanggal 09-11 Desember 2023.



- Monitoring Bantuan Kemasan Industri Kecil Menengah (IKM) ke Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 11 – 12 Desember 2023.
- Monitoring Bantuan Kemasan Industri Kecil Menengah (IKM) ke Kabupaten Pringsewu pada tanggal 6 – 7 Desember 2023.



- Monitoring bantuan Kemasan Industri Kecil Menengah (IKM), ke Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 – 15 Desember 2023.



- Penyerahan bantuan Kemasan Secara Simbolis Kepada 25 IKM pangan olahan dan kerajinan, pada tanggal 4 Oktober 2023.



- Konsultasi Pengembangan Rumah Kemasan dan Kunjungan Kerja ke Klinik Desain Merk Kemasan Kementerian Perindustrian RI, pada tanggal 1-3 November 2023.



- Pemberian Bantuan kemasan ke Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 9-10 November 2023.



- Memberikan bantuan Kemasam bagi IKM pada acara Pengajian Akbar Pemerintah Provinsi Lampung Ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 15 November 2023.

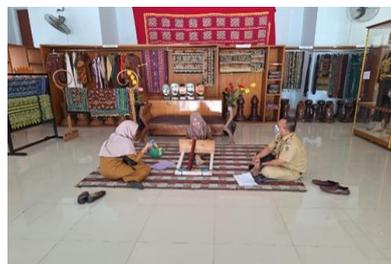


- e. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jumlah target indicator 1 dokumen. Realisasi anggarannya sebesar Rp. 38.209.800,- (76,42%). Sub kegiatan ini telah dilaksanakan mealalui :

- ✓ Koordinasi Perkembangan Dokumen RPIK di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus yang bertujuan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).



- ✓ Evaluasi Registrasi SIINas bagi Industri Kecil di Kabupaten Lampung Timur bertujuan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan perusahaan industri/IKM dalam penyampaian data SIINas.



- ✓ Diseminasi data industri di Aplikasi SIINas dan Konsultasi RPIP Lampung tahun 2023.



II. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sisten Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Realisasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp.74.661.775,- (99,55%). Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui :
 - Disverifikasi terhadap pemenuhan komitmen persyaratan perizinan berusaha pada sembilan (9) Perusahaan di Provinsi Lampung.





- Mengevaluasi dan memverifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh pelaku industri pada bulan oktober 2023 ke PT. Sariguna Primatrirta di Kabupaten Lampung Timur dan PT. Visi Prima Artha di Bandar Lampung.



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Realisasi anggaran senilai Rp.99.270.154,- (99,27%). Sub kegiatan ini melakukan pengawasan wasdal terhadap empat (4) perusahaan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan guna meningkatkan efektivitas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, yang berlaku. Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 perusahaan di wilayah Provinsi Lampung.



- Pada bulan Oktober 2023 telah dilaksanakan pengawasan ke PT. Great Giant Pineapple di Kabupaten Lampung Tengah, PT. Haldin Pacific Semesta di Kabupaten Pesawaran dan PT. Sumber Indah Perkasa Di Kabupate Tulang Bawang.



- Pada bulan Desember telah dilakukan pengawasan industri ke PT. Gula Putih Mataram di Kabupaten Lampung tengah dan PT. Silva Inhutani Lampung di Kabupaten Mesuji.



III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi anggaran senilai Rp. 49.485.520,- (98,97%).
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi anggaran senilai Rp. 29.811.030,- (99,37%).

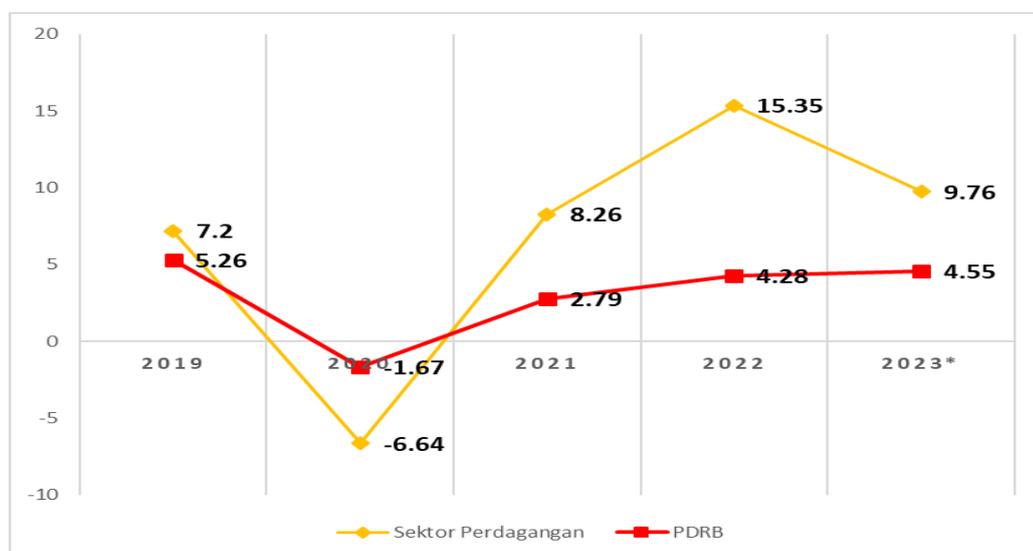
B. SASARAN 2

SASARAN 2														
Sasaran 1		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan												
IKU		: Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)												
Satuan		: Persentase												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	7,20	-	-	-6,64	-	5,30	8,26	155,85	6,3	15,35	243,65	6,8	9,76	143,53

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan” dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 9,76 % dari target sebesar 6,8% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 143,53% atau tercapai 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun keempat Renstra atau tahun ketiga setelah perubahan Renstra. Capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa capaian meningkat. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi**.

Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2023 mencatatkan nilai sebesar 9,76%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu (y on y) dan tahun 2022 tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan terendah sektor perdagangan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -6,64%.

Grafik 3.2
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB





Persentase pertumbuhan sector perdagangan tahun 2023 melampaui pertumbuhan sector perdagangan tahun 2019 sebelum Pandemi covid 19, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan di provinsi Lampung telah menggeliat setelah terpuruk pada masa Pandemi.

SASARAN 2		
Sasaran 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
IKU	:	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)
Satuan	:	Persentase
Provinsi 2024		Nasional 2023
Target	Capaian	Realisasi
7,2	135,56	4,85

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan pada indikator “Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan” capaian kinerja tahun 2023 dibanding dengan target kinerja akhir Renstra di tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 135,56% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 7,2%. Capaian tersebut merupakan persentase capaian kinerja dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja Pertumbuhan sector perdagangan Provinsi Lampung sebesar 9,76% dibandingkan dengan pertumbuhan sector perdagangan Nasional cukup tinggi dimana Nasional hanya sebesar 4,85%.

Indikator Pertumbuhan Sektor Perdagangan adalah Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan. Perhitungannya Pertumbuhan sektor Perdagangan diperoleh dari:

$$\frac{\text{PDB Perdagangan } t - \text{PDB Perdagangan } t-1}{\text{PDB Perdagangan } t-1} \times 100\%$$

Sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sepanjang tahun 2023. Potret sektor perdagangan secara utuh di Indonesia dapat diperoleh dari Survei Perdagangan. Survei ini dilaksanakan di Provinsi Lampung pada 15 Kab/kota dengan metode systematic sampling. Data yang dihasilkan dari survei

ini merupakan nilai-nilai estimasi yang merepresentasikan kondisi sektor perdagangan hingga level provinsi untuk kondisi tahun 2023, yang memiliki usaha/ perusahaan dengan skala menengah dan besar. Survei Profil Perdagangan mencakup semua usaha/perusahaan dengan skala Usaha Menengah dan Besar (UMB) pada Kategori G, yaitu KBLI 45, 46, dan 47 tanpa membedakan usaha/perusahaan tersebut melakukan Perdagangan Antar Wilayah (PAW) maupun tidak melakukan PAW. Adapun data yang disajikan adalah data usaha/perusahaan berskala menengah dan besar kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) saja.

Nilai Pertumbuhan sektor Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Lampung
menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,50	1,96	0,55	28,34	27,87	27,29
B. Pertambangan dan Penggalian	-5,42	-3,73	2,89	5,60	5,89	5,25
C. Industri Pengolahan	4,69	0,40	1,40	19,72	18,56	18,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-6,59	6,26	1,13	0,14	0,14	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,94	3,72	0,51	0,11	0,10	0,10
F. Konstruksi	6,95	3,82	7,06	9,90	9,75	9,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,14	15,47	9,76	11,69	13,20	13,98
H. Transportasi dan Pergudangan	2,41	20,31	16,66	4,96	5,98	7,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,54	12,61	13,38	1,48	1,52	1,61
J. Informasi dan Komunikasi	6,37	0,48	7,50	4,28	3,89	3,88

Laju pertumbuhan sektor Perdagangan tahun 2023 terlihat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat beberapa permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi
Dalam Pertumbuhan Sektor Perdagangan

No.	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1.	<p>1. Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan antar daerah, serta akses pasar dalam dan luar negeri untuk produk unggulan daerah;</p> <p>2. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, melalui mekanisme pengaduan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.</p>	<p>1. Di sisi Lapangan Usaha (LU), Ekonomi Provinsi Lampung 2023 dibanding periode yang sama tahun 2022 menurun dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Jasa Lainnya, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Perusahaan yang tumbuh cukup tinggi.</p> <p>2. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-2023 terhadap triwulan</p>	<p>1. Melambatnya pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung yang juga tercatat melambat yang di pengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat dan perekonomian yang belum stabil dan perekonomian global yang mengalami perlambatan.</p>	<p>1. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p>2. Pengembangan sarana dan prasarana Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dan pengembangan sumber daya Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.</p>	<p>1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.</p> <p>2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.</p>



		<p>III-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,93 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 13,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,53 persen.</p>			
--	--	--	--	--	--

Kegiatan yang mendukung Pencaapaian Indikator kinerja Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Pencapaian realisasi target kinerja dalam persentase pertumbuhan sektor perdagangan didukung oleh berbagai macam kegiatan pendukung dari beberapa program dan sumber dana yang berbeda, baik APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 maupun dana APBN melalui dana Dekonsentrasi. Sasaran kinerja yang berkaitan dengan upaya meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam PDRB Provinsi Lampung maupun dalam PDB Nasional. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB, dengan target 6,8% dan realisasi sasaran strategis ini adalah 9,76% yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator pada tahun 2023 adalah 100%. Program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

I. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, dengan pagu anggaran Rp. 58.750.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 58.750.000,- dengan jumlah target indikator 50 orang. Realisasi anggaran senilai Rp. 58.750.000,-(99,64%). Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pasar lelang komoditi agro pada tanggal 18 Agustus 2023 di Hotel Alfiya Bandar Lampung, yang di hadiri oleh 40 peserta.



- Identifikasi Komoditi Agro pada tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2023 di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.



- Identifikasi Komoditi Agro dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2023 di Kabupaten Lampung Barat, 23 - 24 Oktober 2023 di Kabupaten Lampung Selatan, 25 Oktober 2023 di Kabupaten Pesawaran.
- Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro, diselenggarakan pada tanggal 31 oktober 2023 di Alfiya Bandar Lampung, yang di hadiri oleh 40 peserta.



II. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa subkegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- Dengan realisasi anggaran senilai Rp.479.941.569,- (95,99%). dengan jumlah target indikator 30 UMKM. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui kegiatan Bazar Produk IKM Binaan Kabupaten/Kota di :
 - Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung, diikuti oleh 50 UKM/IKM.



- Pelaksanaan Bazar di halaman pendopo Kabupaten Peringsewu, diikuti oleh 50 UKM/IKM.



- Dilaksanakan Bazar di lapangan ambarawa Kota metro, diikuti oleh 25 UKM/IKM.



- Pelaksanaan Bazar di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, diikuti oleh 20 UKM/IKM.



Pada triwulan III telah dilaksanakan kegiatan kegiatan Misi Dagang antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 14 Agustus 2023 di Hotel Ibis Styles Semarang Jawa Tengah.



2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp.266.750.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

a. Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.91.750.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan. Dengan realisasi anggaran senilai Rp.91.708.900,- (99,96%). Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi Merek Dagang bagi UKM/IKM di Tingkat Provinsi Lampung pada tanggal 01 Desember 2023 di De Green Hotel Bandar Lampung yang di hadiri oleh 70 UKM/IKM.



- Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Pangan Nusa di BSD Tangerang, Provinsi Banten. Pada tanggal 18 s.d. 22 Oktober 2023 dengan membawa 5 (lima) UKM sebagai peserta pameran pangan nusa dari Provinsi Lampung.



b Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.175.000.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp.174.725.100,- (99,84%), dan jumlah target indikator 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Rantai Pasok Bawang Merah Provinsi Lampung Tahun 2023 pada tanggal 28 november 2023 di De Green Hotel Bandar Lampung yang di hadiri oleh 30 UKM bawang merah.



- Kegiatan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah dan Misi Dagang ke Kalimantan Timur, pada tanggal 21 s.d.23 desember 2023 di Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan dalam Penyusunan rencana kerja sama antara Pemda Provinsi Lampung dan Pemda Provinsi Kaltim pd sektor perekonomian dalam rangka mengendalikan laju inflasi daerah.



III. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 303.600.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Pembedayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.279.850.000,- dengan jumlah target indikator 1 BPSK. Realisasi anggaran senilai Rp. 279.562.885,- (99,90%). Sub kegiatan telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti :
 - Hari Konsumen Nasional di halaman PKOR way halim Bandra Lampung pada tanggal 16 Juni 2023 yang dihadiri oleh Gubernur Lampung beserta jajaran dan masyarakat.





- Melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi BPSK Kota Palembang, pada tanggal 10 s.d. 11 Juli 2023 di Kota Palembang.



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.23.750.000,- dengan jumlah target indikator 5 pengaduan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen Provinsi Lampung pada tanggal 29 November 2023 di De Green Hotel Bandar Lampung, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.686.900,-(99,73%).



2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.990.847.000,00,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Verifikasi Mutu Produk, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.114.593.000,- Realisasi anggaran untuk Verifikasi Mutu Produk ini senilai Rp.99.505.550,- (86,83%).dengan jumlah target indikator 6 komoditas. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui kegiatan :

- Verifikasi mutu produk di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur untuk komoditas kopi, lada hitam, beras dan kakao, rincian matrik sebagai berikut:

No.	Komoditi	Nama Petani/Pengepul	Alamat	No. HP
1.	Kakao	Hj. Joni (Pengepul)	Ds. Tatan, Pesawaran	082379680824
2.	Kakao	Toni (Pengepul)	Ds. Pesawaran	08111944420
3.	Kakao	Tamrin	Kec. Way Lima, Pesawaran	082186660141
4.	Kakao	Marjuki	Kec. Way Lima Pesawaran	081278942781
5.	Kakao	Sri Herawati	Kec. Way Khilau, Pesawaran	082278832330
6.	Beras	Rohayati (Pedagang)	Kec. Pardasuka Pringsewu	082177144210
7.	Beras	Sarino (Pabrik)	Pardasuka, Pringsewu	081279890791
8.	Beras	Mungkadi (Pabrik)	Kec. Pardasuka, Pringsewu	082175318019
9.	Beras	Berkah Jaya (Pabrik)	Kec. Ambarawa Timur, Pringsewu	081540940799
10.	Beras	Kasbi (Pabrik)	Kec. Gadingrejo, Pringsewu	081279601444
11.	Kopi	Supinah	Kec. Sumberejo, Tanggamus	-
12.	Kopi	Pengepul	Kec. Sumberejo, Tanggamus	-
13.	Kopi	Pengepul	Kec. Pulau Panggung, Tanggamus	-
14.	Kopi	Pengepul	Kec. Pulau Panggung, Tanggamus	-
15.	Kopi	Pengepul	Kec. Pulau Panggung, Tanggamus	-
16.	Lada Hitam	Dwi Kusmiati	Margatiga, Lampung Timur	081369273468
17.	Lada Hitam	Warsiyem	Margatiga, Lampung Timur	085213477369
18.	Lada Hitam	Sarmin	Margatiga, Lampung Timur	082375623165
19.	Lada Hitam	Ari Tonang	Sukadana Tengah, Lampung Timur	085383444989
20.	Lada Hitam	Sholeh	Sekampung Udik, Lampung Timur	082181342065

- a. Pengembangan Layanan Pengujian, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 460.860.800,- dengan jumlah target indikator 12 dokumen. Sub kegiatan ini telah melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian atas 558 komoditas kopi dan lada, realisasi anggaran senilai Rp. 447.089.680,- (97,01%).



- b. Pengembangan Layanan Sertifikasi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 208.632.500,- dengan jumlah target indikator 1.935 sertifikat. Sub kegiatan pada tahun 2023 telah menerbitkan sertifikat sebanyak 902 komoditas kopi dan lada, dan telah melaksanakan jasa transaksi keuangan

pada tanggal 12 – 14 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Komite Akreditasi Nasional (BKAN). Realisasi anggaran senilai Rp. 204.460.813,- (98%)

c. Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 206.760.700,- dengan jumlah target indikator 45 sertifikat. Realisasi anggaran senilai Rp. 200.259.764,- (96,86%). Sub kegiatan ini telah melaksanakan :

- Bimtek internal peningkatan kualitas SDM pada bulan Februari 2023 di ruang aula UPTD BPSMB dengan jumlah 15 peserta.
- Malaksanakan pengadaa alat laboratorium thermocoiple oleh CV. KAHURIPAN MADANI, pada tanggal 17 November 2023 di kantor UPTD BPSMB.
- Melaksanakan Bimtek Internal Kalibrasi Suhu da Volumetrik, pada tanggal 13 s.d. 16 Desember 2023 di kantor UPTD BPSMB dengan jumlah peserta 19 orang.



□ □

□ □

3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 67.500.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.47.500.000,- dengan jumlah target indikator 25 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan melalui Konsultasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terkait Pengawasan Perusahaan Jasa Pengiriman ke Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan R.I pada tanggal 11 s.d. 13 September 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini senilai Rp. 47.487.000,-(99,97%).



- b. Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 kasus. Sub kegiatan ini telah melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kemendag RI di jakarat dan BPSK Kota Bandung, pada tanggal 18 s.d. 20 September 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini senilai Rp.19.974.850,- (99,87%).

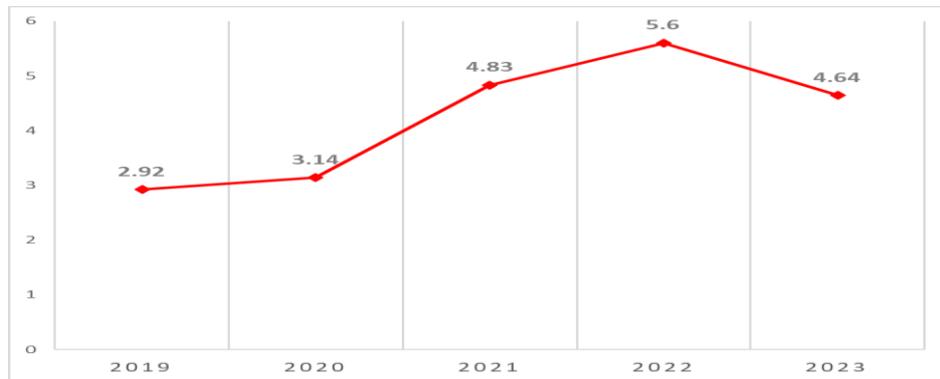


C. SASARAN 3

SASARAN 3														
Sasaran 3		Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri												
IKU		: Nilai Ekspor Non Migas												
Satuan		: Miliar US\$												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	2,13	-	3,50	3,14	89,71	3,33	4,83	145,04	3,48	5,61	161,20	3,65	4,65	127,40

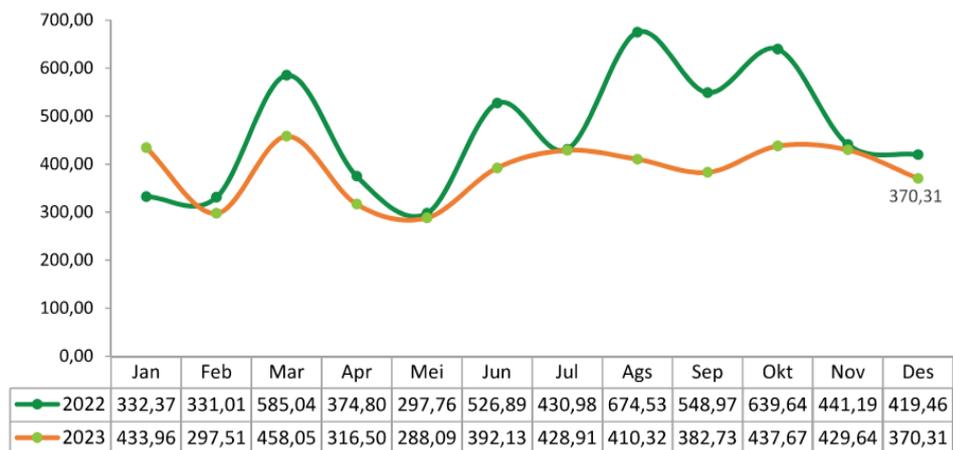
Sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Nilai Ekspor Non Migas” dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 4,65 Miliar US\$ dari target sebesar 3,65 Miliar US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerja adalah 127,40% atau tercapai 100%, capaian ini menunjukkan penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi** pada capaian kinerja.

Grafik 3.3
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas



Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencatatkan nilai sebesar 4,64 miliar US\$. Kinerja baik ekspor non migas menurun dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2022 karena menurunnya harga komoditas di pasar global namun perekonomian negara – negara tujuan ekspor Provinsi Lampung masih menunjukkan kondisi yang baik. Nilai ekspor non migas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 2,92 miliar US\$.

Grafik 3.4
Perkembangan Ekspor Per bulan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022



Ekspor Komoditi Tahun 2023 dengan nilai tertinggi terjadi di Bulan Maret, dan kinerja ekspor terendah terjadi di bulan Mei, secara keseluruhan tidak terlalu berfluktuasi. Namun nilai ekspor tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terlihat lebih rendah.



Tahun 2023 adalah tahun keempat Renstra sehingga perbandingan capaian kinerja untuk indikator Nilai Ekspor Non Migas tahun 2023 yaitu 127,40%, menunjukkan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi pada capaian kinerja

SASARAN 3		
Sasaran 3	:	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri
IKU	:	Nilai Ekspor Non Migas
Satuan	:	Miliar US\$
Provinsi 2024		Nasional 2023
Target	Capaian	Realisasi
3,8	122,37	258,82

“Nilai Ekspor Non Migas” dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 4,64 Miliar US\$ dibanding dengan capaian akhir Renstra tahun 2024 yaitu dengan capaian sebesar 122,37% dari target sebesar 3,8 Miliar US\$ sehingga persentase capaian ini menunjukkan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi pada capaian kinerja. Walaupun Nilai Ekspor Non migas Provinsi Lampung sebesar 4,65 Miliar US\$ namun dibanding dengan nilai Ekspor Nasional sebesar 258,82Miliar US\$ ekspor Lampung memberi kontribusi sebesar 1,79% dari total ekspor Nasional.

Indikator Kinerja Nilai Ekspor adalah Kinerja ekspor Provinsi Lampung yang mengacu pada nilai Free On Board (FOB) dan dinyatakan dalam Dollar Amerika (US\$). Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam perdagangan luar negeri.

Adapun perhitungan Nilai Ekspor adalah dengan menjumlahkan Nilai ekspor dari tiap bulan dalam 1 (satu) tahun yaitu Ekspor Januari di tambahkan dari tiap bulan sampai dengan bulan Desember. Formulasi Perhitungan Nilai Ekspor yaitu:

$$\text{Nilai Ekspor bulan Januari} + \dots + \dots + \text{Nilai Ekspor bulan Desember}$$

Nilai Ekspor Provinsi Lampung merupakan hasil ekspor dari sektor :

1. Industri Pengolahan, tahun 2023 berkontribusi sebesar 69,18 % dari total ekspor Lampung
2. Hasil Pertambangan, untuk tahun 2023 berkontribusi sebesar 20,92% dari total Ekspor Lampung



3. Hasil Pertanian, pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 9,90% dari total ekspor Lampung

Ekspor Lampung terdiri dari 10 (Sepuluh) golongan barang utama ekspor pada 2023 yang terdiri dari lemak dan minyak hewan/nabati; bahan bakar mineral; ampas dan sisa industri makanan; olahan dari sayuran, buah, dan kacang; kopi, teh, rempah-rempah; pulp dari kayu; gula dan kembang gula; kayu, barang dari kayu; berbagai produk kimia; serta olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska.

Indikator Nilai Ekspor dalam pencapaiannya menghadapi permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Perdagangan Luar Negeri, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi
Dalam Perdagangan Luar Negeri

No.	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1.	<p>1. Pengembangan dan diversifikasi produk ekspor potensial belum optimal;</p> <p>2. Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan luar negeri, serta akses pasar luar negeri untuk produk unggulan daerah;</p>	<p>1. Pemulihan ekonomi Negara mitra dagang utama Provinsi Lampung meningkatkan permintaan ekspor untuk industri pengolahan makanan cukup signifikan dari Amerika, Eropa, Asia Timur dan Arab Saudi.</p> <p>2. Peningkatan kinerja ekspor luar negeri di Provinsi Lampung bersumber dari peningkatan volume ekspor Batubara, CPO, Lada dan Kopi.</p>	<p>1. Masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.</p> <p>2. Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.</p> <p>3. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Lampung.</p>	<p>1. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir.</p> <p>2. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.</p>	<p>Program Pengembangan Ekspor</p>



		Peningkatan harga CPO Internasional mendorong kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati meningkat tajam.	4. Harga komoditas dunia yang cenderung menurun, sehingga nilai ekspor menjadi menurun.		
--	--	---	---	--	--



Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2023 beserta perbandingan dengan nilai ekspor non migas tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	Ekspor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Non Migas (Miliar US\$)	2,929	3,144	4,837	5,606	4,645

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel 3.8, nilai ekspor non migas sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 4,645 Miliar US\$. Nilai ini turun di bandingkan tahun 2022 yang merupakan nilai tertinggi selama kurun waktu lima tahun, ekspor terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 2,929 Miliar US\$. Dari Tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa nilai ekspor Provinsi Lampung bergerak secara fluktuatif dari tahun 2019-2023.

Tabel 3.9
Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

Golongan Barang	Nilai Free On Board (FOB) (Juta US\$)				Perubahan Des 2023 thd Nov 2023 (persen)	Perubahan Jan-Des 2023 thd Jan-Des 2022 (persen)	Peranan terhadap Ekspor Des 2023 (persen)	Peranan terhadap Ekspor Jan-Des 2023 (persen)
	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des 2022	Jan-Des 2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lemak dan minyak hewan/nabati	142,15	113,83	1.952,86	1.599,42	-19,92	-18,10	30,74	34,43
Bahan bakar mineral	162,80	103,01	1.253,07	1.059,30	-36,73	-15,46	27,82	22,80
Ampas dan sisa industri makanan	12,39	38,07	390,33	313,06	207,15	-19,80	10,28	6,74
Olahan dari sayuran, buah, dan kacang	21,79	20,89	332,26	274,97	-4,12	-17,24	5,64	5,92
Kopi, teh, rempah-rempah	33,03	20,31	630,12	447,24	-38,50	-29,02	5,49	9,63
Pulp dari kayu	2,58	16,62	240,95	205,67	543,49	-14,64	4,49	4,43
Gula dan kembang gula	9,76	10,20	83,08	108,36	4,52	30,42	2,76	2,33
Kayu, barang dari kayu	3,85	8,66	61,07	96,94	124,86	58,72	2,34	2,09
Berbagai produk kimia	6,46	8,46	167,81	90,40	31,00	-46,13	2,28	1,95
Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska	6,23	7,20	107,09	83,53	15,58	-21,99	1,94	1,80
Total 10 Golongan Barang Utama	401,04	347,24	5.218,64	4.278,88	-13,41	-18,01	93,77	92,10
Lainnya	28,59	23,06	382,46	366,94	-19,34	-4,06	6,23	7,90
Total Ekspor	429,64	370,31	5.601,10	4.645,81	-13,81	-17,06	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Kinerja ekspor tercatat negatif, dibandingkan pertumbuhan net ekspor yang tinggi pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar -17,06 terhadap nilai ekspor tahun 2022.



Pada tahun 2023 ekspor tercatat sebesar 4,645 Milyar US\$, menurun cukup significant jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 5,601 Milyar US\$.

Apabila dilihat pada Tabel 3.9 Pada Tahun 2023, ekspor minyak dan lemak nabati merupakan komoditi dengan nilai tertinggi. Pada produk kimia mengalami penurunan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar -46,13%.

Seiring pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Lampung, terutama Amerika Serikat dan India yang merupakan tujuan utama ekspor seperti terlihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

Negara Tujuan	Nilai Free On Board (FOB) (Juta US\$)				Perubahan Des 2023 thd Nov 2023 (persen)	Perubahan Jan-Des 2023 thd Jan-Des 2022 (persen)	Peranan terhadap Ekspor Des 2023 (persen)	Peranan terhadap Ekspor Jan-Des 2023 (persen)
	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des 2022	Jan-Des 2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
India	25,73	57,15	717,75	606,64	122,16	-15,48	15,43	13,06
Amerika Serikat	64,68	53,09	846,53	683,40	-17,93	-19,27	14,34	14,71
Belanda	3,43	39,30	381,87	309,22	1.044,50	-19,03	10,61	6,66
Korea Selatan	19,33	36,53	286,35	237,89	88,98	-16,92	9,86	5,12
Tiongkok	40,88	32,22	622,34	597,34	-21,18	-4,02	8,70	12,86
Pakistan	23,13	20,03	388,12	370,78	-13,38	-4,47	5,41	7,98
Vietnam	6,28	15,19	46,51	98,62	141,83	112,05	4,10	2,12
Jepang	6,37	13,04	284,50	134,94	104,64	-52,57	3,52	2,90
Philipina	10,53	12,07	140,17	115,39	14,63	-17,68	3,26	2,48
Selandia Baru	5,31	10,88	173,35	82,34	104,81	-52,50	2,94	1,77
Total 10 Negara	205,67	289,50	3.887,51	3.236,56	40,76	-16,74	78,18	69,67
Lainnya	223,96	80,80	1.713,59	1.409,26	-63,92	-17,76	21,82	30,33
Total Ekspor	429,64	370,31	5.601,10	4.645,81	-13,81	-17,06	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada Tahun 2022 Amerika merupakan negara tujuan ekspor yang menyumbang nilai ekspor terbesar dan tahun 2023 Amerika tetap menjadi negara tujuan ekspor utama Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 683,40 Juta US\$ atau sekitar 14,71% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana nilai ekspor ke Amerika Serikat pada tahun 2022 sebesar 846,53 Juta US\$. Negara India merupakan negara tujuan ekspor tertinggi kedua setelah Amerika pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang turun -15,48%.

Tren penurunan nilai ekspor non migas yang terjadi di tingkat nasional terlihat juga di Provinsi Lampung, penurunan nilai ekspor non migas Lampung berada di atas nilai

ekspor Nasional yaitu -17,06% dibanding Nasional yang turun sebesar -6,21%. Hal ini disebabkan nilai komoditi dunia yang mengalami penurunan. Berikut kami sajikan perbandingan ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas nasional sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung
dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional

No	Keterangan	Tahun		Perubahan
		2022	2023	
1	Nasional	275,96 Milyar US\$	258,82 Milyar US\$	-6,21 %
2	Provinsi Lampung	5,60 Milyar US\$	4,64 Milyar US\$	-17,06 %

Dari tabel 3.11 diatas terlihat bahwa nilai ekspor di tingkat nasional tahun 2023 sebesar 258,82Milyar US\$ dan turun dari tahun 2022 dengan nilai 275,96 Milyar US\$. Kondisi ini sama dengan kinerja ekspor Provinsi Lampung dimana nilai ekspor non migas Provinsi Lampung turun dari 5,60 Milyar US\$ menjadi 4,64 Milyar US\$ di tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun keempat renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Ekspor Non Migas" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target tahun 2022.

➤ **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam menjalankan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selalu berusaha melibatkan dan menyentuh masyarakat, salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatnya nilai perdagangan luar negeri dengan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah nilai ekspor non migas. Sasaran ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor serta meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat bersaing di pasar Internasional agar berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Provinsi Lampung.

Target kinerja dalam nilai ekspor non migas senilai 3,65 Milyar US\$ dan pencapaian realisasi kinerja sebesar 4,64 Milyar US\$. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator pada tahun 2023 adalah 100%, ini menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung. Penyebab terjadinya nilai ekspor dari target dikarenakan harga komoditi dunia yang mengalami penurunan dan banyaknya permintaan komoditi dari beberapa negara tujuan ekspor Provinsi Lampung usai masa pandemi Covid-19.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, dengan pagu anggaran Rp.1.250.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pameran Dagang Internasional/Nasional. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 800.000.000,- dengan jumlah target indikator 4 pelaku usaha. Sub kegiatan ini telah melakukan promosi produk unggulan dan peningkatan kerjasama bidang pertanian, perdagangan dan pariwisata ke Negara Vietnam, pada tanggal 22 – 26 November 2023 yang diikuti oleh 15 peserta UKM. Dengan realisasi anggaran senilai Rp. 759.909.560,- (94,99%). Kunjungan kerja bertujuan untuk menjajaki kerjasama dibidang perdagangan komoditi hasil pertanian dan pengelolaan komoditi perkebunan dan hasil Laut.



- b. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 450.000.000,- dengan jumlah target indikator 175 pelaku usaha ekspor. Dengan realisasi anggaran senilai Rp. 449.919.040,- (99,98%). Sub kegiatan telah dilaksanakan melalui kegiatan:

- Prakurasi Calon Peserta ECP TA 2023 di Kab/Kota Provinsi Lampung dengan jumlah peserta 40 UKM dari setiap Kab/Kota.
- ECP Tahap I (Workshop) di Bandar Lampung pada tanggal 21-24 Februari 2023 dengan jumlah 30 peserta.
- Sosialisasi Produk Makanan dan Minuman Yang berorientasi Ekspor di Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 2023 dengan jumlah 40 peserta.
- ECP Tahap II (Training Of Exporter) di Bandar Lampung pada tanggal 23-25 Mei 2023 dengan jumlah 40 peserta .
- ECP tahap VII Evaluasi dan penutupan di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2023 dengan jumlah 30 peserta.



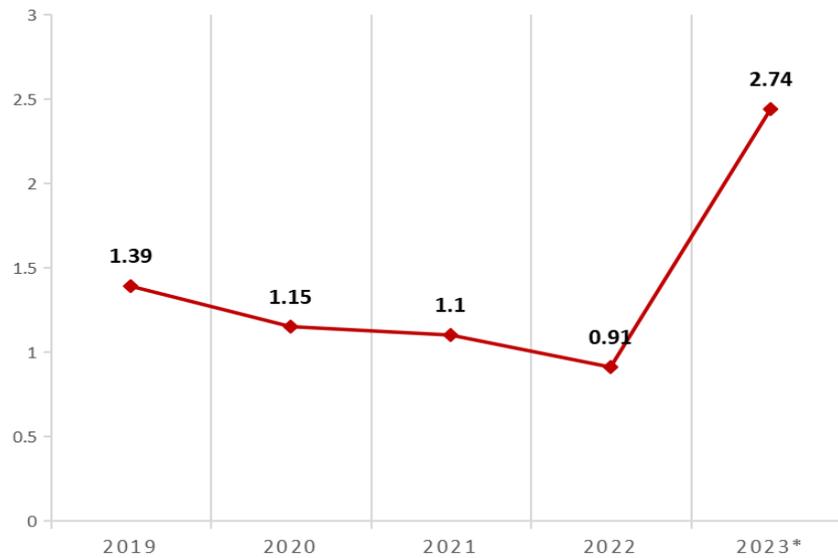
SASARAN 4

SASARAN 4														
Sasaran 4		Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting												
IKU		: Andil Inflasi Bahan Makanan												
Satuan		: Persentase												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	2,13	-	-	-	-	≤1,5	1,1	100	≤1,5	0,91	100	≤1,5	2,74	82,66

Sasaran “Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting” dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu “Andil inflasi Bahan Makanan” adalah sebesar 2,74 % dari target sebesar kisaran $\leq 1,5$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,66%, capaian ini tidak sesuai target

yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun keempat perubahan target Renstra, Indikator "Andil inflasi Bahan Makanan" masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja tinggi**.

Grafik 3.4
Andil Inflasi Bahan Makanan



Pada tahun 2023, nilai andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi sebesar 2,74%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga pada bahan makanan terjadi kenaikan yang cukup significant. Walaupun terjadi beberapa kali lonjakan harga bahan pokok. Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,39%. Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,91%

SASARAN 4		
Sasaran 4	:	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting
IKU	:	Andil Inflasi Bahan Makanan
Satuan	:	Persentase
Provinsi 2024		Nasional 2023
Target	Capaian	Realisasi
≤ 2	37	1,60



Capaian Indikator “Andil inflasi Bahan Makanan” tahun 2023 terhadap target indikator akhir Renstra tahun 2024 sebesar 2,74 % dari target sebesar kisaran ≤ 2 terealisasi atau terjadi kenaikan andil inflasi diatas 2% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 37%, Capaian ini di bawah target yang diperjanjikan. Nilai andil Inflasi bahan makanan tingkat Nasional sebesar 1,60% di banding dengan andil inflasi bahan makanan Provinsi Lampung melebihi target yaitu $\leq 1,5$ % dari target. Hal ini terjadi karena lonjakan harga beberapa komoditi bahan makanan. Sehingga indikator ini baik capaian provinsi maupun Nasional adalah 66,6% dan masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja sedang**.

Indikator Andil Inflasi bahan makanan adalah menggambarkan andil/sumbangan pembentukan nilai inflasi dari kelompok bahan makanan. Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam pengendalian inflasi,

Perhitungan Indikator Andil Inflasi Bahan makanan yaitu :

Andil Inflasi Bahan Makanan Januari + + Andil Inflasi Makanan Desember

Perkembangan harga komoditas pangan yang berpotensi menyumbang inflasi, salah satunya telur ayam yang harganya tengah melambung, komoditas pangan berupa daging dan telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih berpotensi besar menyumbang inflasi periode Mei 2023. “Karakteristik cenderung mengalami kenaikan atau berfluktuasi antar waktu dan antar wilayah. Komoditas ini kecenderungannya inflasi.” Sementara kelompok komoditas yang cenderung stabil yaitu termasuk beras, minyak goreng, daging sapi, dan tempe.

Di sisi lain, kelompok komoditas yang memiliki kecenderungan turun harganya pada periode yang sama, yaitu cabai merah dan cabai rawit. Harga bawang merah naik paling signifikan, harga bawang merah cenderung mengalami penurunan di kebanyakan kab/kota. Banyaknya kab/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah ini menjadi ciri terjadinya inflasi untuk komoditas bawang merah. Bawang putih juga terjadi kenaikan harga di banyak wilayah. Sementara daging ayam ras telah menunjukkan kenaikan harga di sejumlah daerah.

Indikator Andil Inflasi bahan Makanan dalam pencapaiannya menghadapi permasalahan, terdapat Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam



Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12
Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi
Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting

No.	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1.	<p>1. Fluktuasi harga komoditi pertanian, terutama bahan pangan pokok masih tinggi, terutama menurunnya harga pada saat panen raya.</p> <p>2. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok dan barang penting;</p>	<p>Kelompok makanan, minuman dan tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi. Disisi lain, tekanan inflasi pada sub kelompok makanan masih tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti komoditas beras, telur ayam ras dan petai.</p>	<p>Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar . Komoditas utama yang Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, daging ayam ras, bawang putih dan rokok putih.</p> <p>Menyumbang tekanan inflasi</p>	<p>1. Meningkatkan pengetahuan, kerjasama, dan pengawasan terhadap andil inflasi terbesar, sehingga dapat menurunkan tekanan terhadap andil inflasi.</p> <p>2. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.</p>	<p>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p>



			pada sub kelompok tersebut		
--	--	--	----------------------------	--	--



➤ **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya menjaga stabilitasi harga bahan pangan pokok penting untuk melihat laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok di pasaran, komoditi yang dominan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bahan makanan diantaranya bawang putih, bawang merah, cabe merah dan gula. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah andil inflasi bahan makanan. Dengan realisasi sasaran strategisnya adalah 2,74% sedangkan target andil inflasi berkisar 1,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja 82,66% pada tahun 2023 dengan ini pencapaian telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk menunjang perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung. Adapun kegiatan program ini yang mendukung indikator kinerja ini antara lain:

1. Pengendalian harga informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan pagu anggaran Rp. 3.707.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan. Sub kegiatan ini melaksanakan pemantauan harga Bapok setiap hari di 7 (tujuh) pasar tradisional yaitu pasar tugu, pasar koga, pasar gintung, pasar kangkung, pasar Panjang, pasar kopindo dan pasar gading rejo yang berada di Bandar Lampung, realisasi anggaran senilai Rp. 117.817.322,- (94,25%).



b. Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 3.582.000.000,- dengan jumlah target indikator 3 laporan. Realisasi subkegiatan ini dengan anggaran senilai Rp.3.580.781.473,- (99,97%). Subkegiatan ini berupa Operasi Pasar pada beberapa titik di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung seperti :

- Pasar kangkong Bandar Lampung pada tanggal 9 Maret 2023.



- Lapangan Korpri kantor Gubernur Lampung pada tanggal 11 Maret 2023.



- Pendopo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 13 Maret 2023.



- Lapangan Samber Kota Metro pada tanggal 20 Maret 2023.



- Halaman Masjid raya Airan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 31 Maret 2023.



- Green Sport Arena Bandar Lampung pada tanggal 06 April 2023.



- Kompleks Yayasan Alhanif Bandar Lampung pada tanggal 14 April 2023.



2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, dengan pagu anggaran Rp. 55.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 29.992.200,- (99,97%).

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jumlah target indikator 3 laporan, Realisasi anggaran senilai Rp. 24.971.050,- (99,88%).

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan Identifikasi Komoditi Agro guna Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak oleh distributor, pada tanggal 30 November 2023.



3.4 Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran TA 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2023 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.775.779.896,- yang terdiri dari yang terdiri 9 (sembilan) program pembangunan 21 (duapuluh satu) kegiatan dan 55 (limapuluh lima) sub-kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.13
Refocusing Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
TA 2023

No	IKU	Capaian IKU	Pagu APBD	Pagu APBD P	% Refocusing	Realisasi Anggaran Perubahan	%
1.	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	23,33	7.647.412.530	9.149.448.307	19,64	9.047.047.723	98,88
2	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	143,52	23.539.366.549	21.614.331.589	-0,81	19.899.432.377	92,06
3	Nilai ekspor non migas	127,12	1.200.000.000	1,250,000,000	4,16	1,209,828,600	96,79
4	Andil inflasi bahan makanan	82,66	380.000.000	3,762,000,000	890	3,753,562,045	99,77
	TOTAL	94,15	31.567.979.079	35.775.779.896	13,32	34.536.513.091	96,54

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp 31.567.979.079,- pada APBD Perubahan pagu bertambah menjadi sebesar Rp 35.775.779.896,- dengan Realisasi anggaran Rp 34.536.513.091,- atau sebesar 96,54%. Refocusing Anggaran Per Indikator Kinerja Utama yaitu



1. Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan sektor Industri pengolahan dengan capaian kinerja sebesar 23,33% atau capaian kinerja **Sangat Rendah** dan Refocusing penambahan anggaran sebesar 19,64% menunjukkan masih kurang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
2. Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan Capaian Kinerja sebesar 143,52% atau capaian Kinerja **sangat Tinggi** dan Refocusing Anggaran berkurang sebesar - 0,81% menunjukkan sangat efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang di Perjanjikan.
3. Indikator Kinerja Nilai Ekspor Non Migas dengan Capaian Kinerja sebesar 127,12% atau capaian Kinerja **sangat Tinggi** dan Refocusing Anggaran bertambah sebesar 4,16% menunjukkan sangat efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja yang di Perjanjikan
4. Indikator Kinerja Andil Inflasi Bahan Makanan dengan Capaian Kinerja sebesar 82,66% atau capaian Kinerja **Tinggi** dan Refocusing Anggaran meningkat cukup significant sebesar 890% dalam upaya untuk pengendalian Inflasi dan menjaga kestabilan harga bahan pangan, menunjukkan sangat efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja yang di Perjanjikan

Tabel 3.13 menunjukkan sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran dengan rata-rata 4 (empat) IKU capaiannya sebesar 94,15% sedangkan kinerja anggaran yang dihasilkan mendorong efisiensi sumber daya sebesar 13,32% atau setara dengan Refocusing peningkatan anggaran sebesar Rp 4.207.800.817,-

Dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:



Tabel 3.14
Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				BELANJA APBD	35,775,779,896	34.536.513.091	96,54	
Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6	1.40	23.33	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN I	9.149.448.307	9.047.047.723	98,88	0.23
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8,894,448,307	8,793,819,244	98,87	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8,894,448,307	8,793,819,244	98,87	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	175,000,000	173,931,929	99,39	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	175,000,000	173,931,929	99,39	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80,000,000	79,296,550	99,12	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	80,000,000	79,296,550	99,12	



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	6,8	9,76	143.52	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN II	21.614.331.589	19.899.432.377	92,06	1.55
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.361.947.000	1.322.027.442	97,06	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	303,600,000	303,249,785	99,88	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	990,847,000	951,315,807	96,01	
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	67,500,000	67,461,850	99,94	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	766,750,000	746,375,569	99,68	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	266,750,000	266,434,000	99,88	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	500,000,000	479,941,569	95,99	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	58,750,000	58,539,610	99,64	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	58,750,000	58,539,610	99,64	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.426.884.589	18.399.132.102	94,71	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263,089,000	254,354,422	96,68	



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,291,725,844	14,752,795,414	96.48	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142,060,000	120,903,000	85.11	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,119,605,570	1,094,598,526	97.77	
				Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50,000,000	49,796,545	99.59	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,513,000,175	1,471,475,440	97.26	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,047,404,000	1,041,825,935	99.47	
Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,65	4,64	127,12	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN III	1,250,000,000	1,209,828,600	96.79	1.31
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1,250,000,000	1,209,828,600	96.79	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000,000	1,209,828,600	96.79	
Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	≤ 1,5	2,74	82,66	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN IV	3,762,000,000	3,753,562,045	99,77	1.83
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3,762,000,000	3,753,562,045	99,77	
				Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang Terintegrasi Dalam Sistem	3,707,000,000	3,698,598,795	99.77	



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Informasi Perdagangan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	55,000,000	54,963,250	99.93	



3.5 Prestasi Yang Dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Agenda Kerja Utama Yang Didukung
1.	Penghargaan Katagori 20 IKM terbaik sebagai peserta Indonesia Food Innovation (IFI) 2023	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi
2.	IKM SAMIYA Pemenang Penghargaan Katagori Produk Makanan Camilan	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi

3.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
	a. Rencana Aksi Agar disusun menggambarkan kegiatan/aksi yang nyata untuk mencapai target kinerja	Tindak Lanjut yang dilakukan adalah Rencana aksi telah disusun setiap tahun serta evaluasi dilakukan secara berkala tiap Triwulan dan Rencana Aksi tahun berikutnya telah disusun dengan menggambarkan aksi untuk mencapai target kinerja	Laporan Rencana Aksi Tahun 2023 dan tahun selanjutnya	Tahun 2022 dan tahun selanjutnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	telah disusun
	b. Agar Publikasi dokumen perencanaan pada aplikasi ESR MenPAN dapat dilaksanakan tepat waktu	Bahwa hanya ada 1 dokumen yang dipublikasikan melewati waktu karena dokumen yang diupload adalah dokumen revisi, sebelumnya sudah di publikasikan.	Tahun 2023 akan tepat waktu	s/d 31 Maret 2023		telah dipublikasi
	c. Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Dengan menyusun target kinerja individu dari setiap pegawai yang mendukung capaian kinerja Perangkat Daerah yang tertuang pada SKP setiap Pegawai dan dievaluasi serta dinilai capaiannya setiap bulan (pada aplikasi E Kinerja). Sehingga pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan, terlihat dari capaian kinerja tiap individu	dimulai di akhir Tahun 2022	2022 s/d tahun yang akan datang		telah disusun



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
a.	Perlu adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, termasuk di dalamnya SOP yang digunakan agar dapat dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Telah disusunnya Formulasi terhadap Indikator kinerja yang tertuang pada Perjanjian kinerja mulai dari Kepala Dinas sampai dengan level staf dan pencapaian kinerja sektor Industri dan Perdagangan dapat dilihat pada aplikasi Adinda dengan alamat https://adinda.disperindag.lampungprov.go.id . Data kinerja dituangkan pada aplikasi E- Kinerja BKN setiap bulannya pada alamat https://kinerja.bkn.go.id/login SOP telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ada pada aplikasi Adinda Lampung.	Tahun 2023 hingga tahun yang akan datang	Tahun 2023		telah disusun
b.	Agar pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi Informasi (aplikasi) dan Dpat diupayakan tepat waktu	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran Capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yaitu aplikasi data sektoral industri dan Perdagangan yang diinput pada aplikasi Adinda dengan alamat https://adinda.disperindag.lampungprov.go.id dan disampaikan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Tim SAKIP Provinsi Lampung. Pengumpulan data kinerja pada tingkat Provinsi melalui ESR dengan link https://esr.menpan.go.id/ dan http://bit.ly/SAKIPLAMPUNG23	Akhir 2022 s/d tahun yang akan datang	Tahun 2023		telah di kumpulkan



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	c. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Akan menggunakan e-Kinerja sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja pada ASN karena hasil penilaian kinerja oleh pimpinan kepada bawahan akan berakibat pada pengurangan tunjangan apabila kinerja masing-masing pegawai tidak tercapai sesuai dengan target kinerja individu yang telah ditetapkan pada SKP. Pengumpulan capaian kinerja individu telah menggunakan E-Kinerja BKN untuk tahun 2023 telah berpedoman pada surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN	Tahun 2023 s/d tahun yang akan datang	2023		di mulai diterapkan Tahun 2023
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
	a. Agar melampirkan bukti asistensi (Berita Acara Desk Laporan Kinerja) yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah direviu	Bahwa bukti asistensi (berita Acara desk Laporan Kinerja) yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah direviu dan telah dilampirkan pada dokumen-dokumen yang diminta oleh Tim evaluasi Inspektorat berupa softcopy yang disampaikan secara online melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1Vl6qljqnoVaFOHWZ03WQ1v0KN7qYFaH	2023	2023		selesai
	b. agar Laporan kinerja disampaikan tepat waktu	Laporan Kinerja akan selalu disampaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	2023	2023		telah dilaksanakan



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	c. Agar dokumen laporan kinerja sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen LKIP telah memuat seluruh informasi mengenai pencapaian kinerja per Indikator beserta pencapaian Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung masing-masing indikator juga faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat, masalah maupun hambatan yang dihadapi	2023	2023		telah dituangkan dalam dokumen
	d. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan efisiensi sumber daya dalam laporan kinerja	Dokumen laporan Kinerja yang tertuang pada dokumen LKIP telah disajikan dan dijabarkan penyesuaian anggaran yang mendukung masing-masing program yang mendukung pencapaian masing-masing indikator kinerja dan menunjukkan efisiensi efektivitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja	2023	2023		telah dituangkan dalam dokumen
	e. Agar seluruh pegawai peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja	Telah disampaikan pada seluruh pegawai, pada rapat pembagian peran hasil agar dapat menyajikan informasi dalam laporan kerjanya yang tertuang dalam rencana aksi laporan kinerja	2023	2023		telah tertera pada Matrik Peran hasil
	f. Agar Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam menyesuaikan aktivitas untuk mencapai kinerja	Pembagian peran hasil dan penyusunan indikator kinerja pegawai, diminta agar informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas kerja untuk mencapai kinerja sesuai target.	2023	2023		



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
4.	Evaluasi atas evaluasi Akuntabilitas kinerja internal					
a.	Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung peningkatan kinerja	Akan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, digunakan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	2023	2023		Akan menjadi acuan



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 23,33%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 143,5%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 127,4%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 82,66%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, 2 sasaran mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, 1 sasaran dengan kriterian **tinggi** sedangkan 1 sasaran dengan realisasi kinerja **sangat rendah**.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.775.779.896,-



dengan realisasi sebesar Rp. 34.536.513.091,- atau sebesar 96,54% yang terdiri dari 9 Program dan 21 Kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

LAMPIRAN

RPJMD							SABARAN										OPD	PROGRAM				KEGIATAN			SUB KEGIATAN																	
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET					NAMA PROGRAM		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA					ANGGARAN									
											2020	2021	2022	2023	2024													2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
1	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	(Nilai PDRB - Nilai PDRB _{t-1}) / (Nilai PDRB _{t-1}) * 100%	Persen	-	5	5,8	6,0	6,3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya perkembangan industri di Provinsi Lampung	Persentase Pertumbuhan Unit Industri di Provinsi (%)	(Jumlah Industri t - Jumlah Industri t-1) / Jumlah Industri t-1 * 100 %	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Meningkatnya Jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri	Persentase SMK yang sudah melakukan kerjasama dengan usaha industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terakselerasi kegiatan pengembangan kawasan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	3.865.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000						
																				Meningkatnya investasi di sektor industri	Persentase peningkatan nilai investasi di sektor industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi SDM Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	-	2	2	2	2	-	165.312.000	732.255.000	875.000.000	900.000.000							
																				Meningkatnya perkembangan IKM unggulan di Provinsi Lampung	Persentase IKM unggulan di Provinsi Lampung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Terakselerasi Koordinasi dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	-	1	1	1	1	-	8.700.000.000	165.000.000	250.000.000	250.000.000							
																				Meningkatnya pemahaman IKM unggulan Provinsi Lampung terhadap prinsip-prinsip Industri hijau	Persentase IKM unggulan yang memahami prinsip-prinsip Industri hijau	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terakselerasi kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	-	2	2	2	2	-	968.294.000	1.305.000.000	1.450.000.000	1.500.000.000							
																				Meningkatnya IKM unggulan yang memiliki standarisasi industri	Persentase IKM unggulan yang telah memiliki standarisasi industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terakselerasi kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	-	-	1	1	1	-	-	70.000.000	85.000.000	85.000.000							
																				Meningkatnya kelengkapan penyertaan pengembangan kawasan industri yang telah terpenuhi	Persentase penyertaan pengembangan kawasan industri yang telah terpenuhi																					
																				Program Pengendalian Izin Usaha	Meningkatnya cakupan pengawasan IUI yang dipantau	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	(Jumlah IUI yang dipantau / Jumlah IUI yang sudah dikeluarkan) * 100 %	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya jumlah industri di Provinsi Lampung	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan perolehan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Verifikasi Teknis Kesesuaian Perizinan dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Verifikasi Teknis Kesesuaian Perizinan dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	-	1	1	1	1	-	98.960.000	125.000.000	135.000.000	135.000.000		
																						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Verifikasi Teknis Kesesuaian Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perizinan Kawasan Industri, Perizinan Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perizinan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perizinan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	1	1	1	1	-	79.609.000	100.000.000	125.000.000	125.000.000							
																				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya perusahaan industri yang masuk ke dalam SIINAS	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	(Jumlah perusahaan industri yang masuk SIINAS / Jumlah perusahaan industri kab/kota yang ada) * 100 %	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Dokumen	-	-	1	1	1	-	107.196.000	125.000.000	125.000.000			
																						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000							
																				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen di Provinsi Lampung	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	(Jumlah jenis barang yang diawasi / Jumlah jenis barang yang harus diawasi) * 100 %	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	Pemberdayaan Konsumen dan Kelemabatan Perlindungan Konsumen	Terakselerasi kegiatan pemberdayaan konsumen	Jumlah Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Unit	-	1	1	1	1	-	74.330.000	30.000.000	75.000.000	75.000.000		
																						Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengujian mutu produk di kab/kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	Verifikasi mutu produk di kab/kota	Terakselerasi verifikasi mutu produk di kab/kota	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	-	-	6	6	6	-	50.000.000	80.000.000	80.000.000					
																						Pengembangan Layanan pengujian	Terakselerasi pengembangan layanan pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	-	3	12	12	12	-	40.000.000	130.000.000	300.000.000	250.000.000							
																						Pengembangan Layanan Sertifikasi	Terakselerasi layanan sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	-	1.896	1.915	1.935	1.955	-	220.000.000	238.000.000	275.000.000	275.000.000							
																						Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terakselerasi layanan kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	-	35	40	45	50	-	40.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000							
																						Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terakselerasi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	-	12	20	25	35	-	71.000.000	180.000.000	225.000.000	225.000.000				
																						Facilitasi Penanganan terhadap pelanggaran Atas ketentuan Perlindungan Konsumen	Terakselerasi fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Kasus yang Diangani	Kegiatan	-	-	1	1	1	-	-	40.000.000	75.000.000	75.000.000							
																						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pangkalan pe-asaran produk - produk IKM Provinsi Lampung	Persentase IKM/PKM yang memperoleh fasilitas pemasaran	(Jumlah IKM yang difasilitasi / Jumlah IKM biawan) * 100 %	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Meningkatnya promosi produk UKM/PKM biawan yang mendapatkan fasilitas	Persentase IKM/PKM biawan yang mendapatkan fasilitas	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terpromosikannya produk UKM/PKM biawan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	UMKM	-	-	10	15	15	-	-	925.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000
																						Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk UKM/UMK	Persentase UKM/UMK biawan yang mendapatkan fasilitas	Facilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terakselerasi peningkatan kualitas produk UKM/UMK	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	-	1	1	1	1	-	43.795.000	50.000.000	125.000.000	150.000.000				



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 015/KP/V.26/Sekret.1/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



Elvira Umihanni, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 02

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Nomor : 015/KEP/V.26/Sekret.1/I/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2 Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	<p>Makna Indikator : Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) industri pengolahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan</p> <p>Rumus Perhitungan : (PDB Industri Pengolahan_t – PDB Industri Pengolahan_{t-1} / PDB Industri pengolahan_{t-1}) x 100%</p>	BPS	-	5	5,8	6	6,3
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	<p>Makna Indikator : Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perindustrian</p> <p>Rumus Perhitungan :</p>	BPS	-	5,3	6,3	6,8	7,2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
			(PDB Perdagangan t – PDB Perdagangan $t-1$ / PDB Perdagangan $t-1$) x 100%						
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	<p>Makna Indikator : Kinerja ekspor Provinsi Lampung yang mengacu pada nilai Free On Board (FOB) dan dinyatakan dalam Dollar Amerika (US\$)</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam perdagangan luar negeri</p> <p>Rumus Perhitungan : Nilai Ekspor Januari + + Nilai Ekspor Desember</p>	BPS	-	3,3	3,48	3,65	3,8
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	<p>Makna Indikator : Menggambarkan andil/sumbangan pembentukan nilai inflasi dari kelompok bahan makanan</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam pengendalian inflasi</p> <p>Rumus Perhitungan :</p>	BPS	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Andil Inflasi Bahan Makanan januari + + Andil Inflasi Makanan Desember						